

Penanggulangan Masalah Pedagang Kaki Lima di Kota Manado Pada Perspektif PKL

Frankie Sundalangi
Fakultas Ekonomi Universitas Klabat

The city of Manado with a population of 420,351 is accoupiyed by 4,046 street hawkers (street vendors). Some believe street hawkers have helped the city government in solving unemployment problem. For buyers, shopping is convenient because it relatively easy to find what they want. They can also buy their shopping goods at a relatively cheaper price. For this reason, steet hawkers are often called asset of the city, the heroes, and many other names. On the other hand, Goverenment and society consider them as trouble makers.traffic jams, dirty roads and streets, choas, are among the problems addressed to them. For this reason, thies topic was chossen: a study on how to solve the problem of street hawkers in the city of Manado. The method used in this study is descriptive survey. The researcher has chosen a sample of 343 out of 4,036 street hawkers and how they do business in the city of Manado. The researcher has also chosen 149 city officers, 13 street policemen, and 44 pedestrians. All samples are selected randomly. There are two questions givin to all respondent: What is the main problem of the existence of street hawkers in the city of Manado? What is the solition to the above problem? Answers to both questions were then analyzed and calclated. The results of this survey are reported as findings to this study. These findings are as follows: the problem of the street hawkers: From the viewpoint of street hawkers, the main problem is that government has located them in a non-strategic area, a too quiet location with less buyers and passersby. From the viewpoint of city officers, street policemen, and pedestrians, the mere existence of street hawkers have created traffic jams and dirty city. The sulation of the problem of street hawkers: Majority of the street hawkers have requested to move to a better location, besicallly where there are many passersby. They also request city officers to change the route of public transpotation to pass certain locations where they are located. Majority of the group of respondents which consist of city officers, street security, and pedestrians opt for relations of street hawkers. Based on these findings, the researcher suggests to all decision makers involved to relocate street hawkers to a more proper place, and to rule them accordingly.

Keywords: PKL, government

*alamat korespondensi

LATAR BELAKANG

Manado terletak di ujung Pulau Sulawesi tepatnya pada 10° 25'88"-10° 39'50" LU dan 124° 47'00"-124° 56'00" BT. Ibukota Provinsi Sulawesi Utara ini memiliki sembilan kecamatan dan dihuni oleh 420.351 penduduk yaitu 209.307 orang laki-laki dan 211.044 orang perempuan sebayannya adalah sebagai berikut (Komentar, 2007)

Tabel 1. Daftar Kecamatan dan Jumlah Penduduk Kota Manado,

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Bunaken	20.997
2	Malalayang	57.082
3	Mapanget	47.366
4	Sarin	24.938
5	Singkil	49.066
6	Tikala	69.028
7	Tuminting	52.015
8	Wanea	59.636
9	Wenang	40.883

Manado dengan visi kedepannya menjadi kota pariwisata Dunia tahun 2010 ini juga sedang dijadikan lahan kehidupan bagi 4,046 (PD Pasar 2006) pedagang kaki lima (PKI). Sangat disayangkan, mereka itu cenderung dinilai sebagai sumber timbulnya sebagai masalah sosial baik oleh Pemkot maupun masyarakat. Mereka cenderung diidentifikasi sebagai pedagang yang memiliki modal kecil, disiplin rendah, tidak memiliki ijin usaha, selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan pemicu terjadinya kemacetan lalu lintas.

Namun ketidak nyamanan bukan hanya datang dari Pemkot dan masyarakat tetapi juga di tingkat PKL sendiri dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas. Menurut Kereh, 2006 munculnya "Bisnis Gelap" jual beli lahan dan tempat usaha meruapakan salah satu dari ktidak jelasan tersebut. Belum lagi soal-soal iuran yang harus dibayar setiap harinya dengan dialih dengan keamanan, sewa tempat, dan kebersihan lingkungan. Padahal belum tentu keamanan dan kebersihan tersebut bisa dijamin.

Sebenarnya kalau dibina dengan baik , mereka itu dapat menjadi asset kota manado yang bisa menambah pundi-pundi pemasukan bagi kota Manado. Setelah melewati perjalanan panjang pembangunan dengan bermacam format dan pendekatan telah menunjukkan

banyak kemajuan yang dicapai.

Namun kedepan permasalahan pokok yang akan menghadapi masih relative besar seperti lambatnya penanggulangan KKN, masih bertumpuknya sampah dimana-mana dan rendahnya kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan rendahnya kesejahteraan masyarakat ini sangat relevan dengan program yang sedang dijalankan pemerintah yakni program Penanggulangan Kemiskinan. Menurut Hamid, 2006 keterpurukan masyarakat di Indonesia sedikit banyak disebabkan salah menerapkan sistem ekonominya. Baik era orde lama dengan sistem ekonomi sosialis maupun era orde baru dengan sistem kapitalis, keduanya sama buruknya. Itulah sebabnya Mulyanto dkk seperti dikutip Hamid menyarankan sebuah sistem ekonomi pancasila atau lebih khusus, Sistem Ekonomi Rakyat.

Dengan demikian jika dilihat dari terminology ini, maka yang dimaksud dengan ekonomi rakyat adalah ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi rakyat ini muncul sebagai akibat ketidakpuasan terhadap perekonomian nasional yang bisa kepada unit-unit usaha besar. Oleh karena itu maka ekonomi rakyat lebih merujuk pada ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia, yang umumnya masih tergolong ekonomi kecil, bercirikan tradisional, dengan modal dan tenaga kerja keluarga, serta teknologi sederhana.

Dengan pengertian di atas maka yang diharapkan adalah bahwa aktivitas-aktivitas sektor industri, pertanian, pertambangan, jasa-jasa dan sebagainya, melibatkan rakyat banyak untuk melakukannya. Mereka yang terlibat dalam aktivitas itu mereka berhak pula untuk memperoleh penghasilan yang layak. Artinya berbagai penghasilan atau keuntungan dari segala penerimaan aktivitas ekonomi bisa dinikmati sebagian besar rakyat yang terlibat oleh produksi itu. Termasuk dalam pengertian ini adalah adanya suatu pola distribusi yang adil sebagai akibat adanya aktivitas produksi diatas.

Peran penting lain ekonomi rakyat adalah dalam penyerapan kerja. Masalah kekurangan kapital (investasi) yang dihadapi Indonesia dipecahkan dengan pola investasi yang padat tenaga kerja. Ini menyiratkan bahwa dengan investasi relatif sedikit usaha kecil-kecil, yang merupakan usaha sebagian besar rakyat Indonesia, bisa membantu memecahkan masalah pengangguran. Unit usaha kecil ini rata-rata hanya membutuhkan Rp 1,5 juta per unit usaha per tahun.

Pedagang kaki lima adalah bagian dari unit usaha kecil ini. Mereka dapat menjadi sumber pendapatan kota Manado. Mereka juga membantu mengatasi kemiskinan dan sekaligus menanggulangi pengangguran. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, mereka berada dalam ketidaknyamanan dan ketidakjelasan. Menurut (Sarwan, 2004) keberadaan mereka sering menimbulkan masalah-masalah sosial seperti terjadinya kemacetan jalan, konflik antara pedagang, konflik antara pedagang dan aparat, pedagang dengan sopir angkutan kota, dan sebagainya. Hal ini memerlukan pemecahan baik masalah lokasi maupun masalah yang lain.

Menurut pengamatan penulis pada beberapa tempat umum telah menempati hampir semua trotoar yang strategi di kota Manado, ada yang menguasai hampir

sepuh badan jalan. Tentu hal ini menimbulkan masalah berantai seperti tertutupnya jalan bagi pejalan kaki, angkutan kota, dan angkutan umum. Etalase-etalase toko tidak terkecuali. Pusat kota pun menjadi tidak bersih dan tidak nyaman bagi warga kota.

Pengamatan yang lain, sering terjadi saling baku hantam dan lempar batu antara petugas Polisi Pamong Praja (PP). Mereka menuturkan, pemerintah tidak bisa melihat kondisi masyarakat yang ada sekarang. Apalagi jika menjelang hari Raya Natal, Tahun Baru atau Idul Fitri. Eksi penerbitan tempat-tempat umum diwarnai saling mempertahankan barang. Polisi PP berkeinginan untuk mengangkat gerobak, sementara PKL berkeinginan mempertahankannya. Akhirnya mereka ini bisa pasrah saja melihat tempet penjualan sudah rata dengan tanah. Namun ada yang membongkar sendiri tempat penjualan mereka. Kerumitan yang timbul dengan keberadaan ini memerlukan pemecahan baik masalah lokasi maupun masalah lain yang berhubungan dengan perilaku mereka supaya tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Hal yang menarik masalah pedagang kaki lima di kota Manado ini, karena mereka semakin hari semakin bertambah. Belum selesai dengan masalah yang lama sudah berdatangan sejumlah besar masalah yang lama sudah berdatangan sejumlah besar masalah yang baru. Menurut pengamatan penulis rupanya setiap hari raya besar apabila seorang PKL pulang kampung, ketika kembali sudah membawa serta PKL yang baru. Mudah-mudahan menjadi yang tidak memerlukan modal dan juga tidak memerlukan adanya tempet berjual.

Menjadi pedagang kaki lima cukup sudah bisa baca dan berhitung. Tidak tamat SD pun boleh. Modal lima ratus ribu sampai satu juta rupiah sudah bisa. Kalaupun belum punya bisa angkat barang duluan dan bayar kemudian. Tempat dimana saja mereka suka, alangkah muda menjadi pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima menimbulkan masalah dan jika bisa mereka itu disingkirkan. Tetapi pada sisi lain mereka adalah warga kota, rakyat Indonesia yang berhak mendapatkan penghidupan yang layak di negeri sendiri seperti yang dijamin oleh sistem ekonomi kerakyatan. Apalagi semua sadar bahwa profesi mereka adalah halal dan dijamin undang-undang. Pemerintah tidak perlu lagi mencarikan pekerjaan bagi mereka, juga tergolong dengan program mereka mengentaskan kemiskinan di negeri ini. Berdasarkan hal-hal diatas tersebut maka pemerintah kota perlu memberikan respon yang tepat untuk mendukung dan memfasilitasi sektor informal khususnya PKL ini. Hal yang menarik dari mereka bahwa yang membuat penulis ingin meneliti masalah-masalah PKL di kota Manado ini sekaligus dengan pemecahan-pemecahannya.

Perumusan Masalah. Fokus penelitian ini yakni masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan Pedagang Kaki Lima di kota Manado dan solusinya menurut usulan-usulan mereka sendiri, Aparat kota, Polisi PP dan Pejalan kaki.

Masalah-masalah PKL. Menurut (Rusli, 1992) PKL adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan aktivitas di sektor informal atau istilah (Damsar, 2002) adalah pedagang sektor informal. Lebih lanjut Damsar menjelaskan, sektor informal di negara-

negara sedang berkembang muncul dari ketidak mampu sektor formal untuk menampung antrian panjang pencari kerja. “Salah satu wujud dari sektor informal adalah kegiatan Pedagang Kaki Lima”, demikian (ESTER, seorang/badan/lembaga dengan menjual barang atau produk dagangan yang memiliki tempat usaha permanen dan sewaktu-waktu dapat berpindah-pindah tempat untuk menjajakan barang dagangannya (BALITBANG Kabupaten Gresik, 2005)

Konsep ekonomi informal muncul pertama kali di dunia ketiga, ketika dilakukan serangkaian penelitian tentang pasar tenaga kerja perkotaan di Afrika. Hart (1973), orang yang memperkenalkan pertama kali konsep tersebut pada tahun 1971, seperti yang dikutip Sarwan, mengemukakan bahwa penyelidikan empirisnya tentang kewiraswastawan di Accra dan kota-kota lain Afrika bertantangan dengan apa yang selama ini diterima dalam perbincangan tentang pembangunan ekonomi.

Menurut (Brata, 2006) paradigma baru sektor informal melihat bahwa sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian sehingga, perlu didukung dan difasilitasi. Namun Brata melanjutkan, dukungan dan fasilitas ini tidak akan banyak bermanfaat bagi sektor informal, seperti PKL, bila prosesnya tidak melibatkan para pelaku sektor tersebut. Sudah menjadi rahasia umum yaitu semua kebijakan dan peraturan-peraturan sehubungan dengan keberadaan PKL ini dibuat di kantor Dewan atau Walikota. PKL hanya bisa pasrah dan mentaatinya, jika tidak mau diuber-uber aparat. Tidak heran kebijakan dan peraturan tidak taati pelaku sektor informal (PKL) secara, sungguh-sungguh.

(Amri, 2006) menyatakan, tentu saja, masalah PKL ini tidak akan pernah hilang, malah akan semakin bertambah dan menjadi masalah yang tidak berujung pangkal. Karena masih menurut Amri kiblat menyelesaikan masalah klasik ini melalui menggunakan satu kacamata, yang sempit dan tidak mengena pada substansi permasalahan. Para birokrat kita masih menggunakan kacamata yang sama untuk melabeli PKL sebagai sebuah komunitas pinggiran, kumuh, sampah dan paling iron lagi perusak keindahan kota.

Menurut (Kereh 2006) para PKL cenderung diidentifikasi sebagai sumber timbulnya berbagai masalah sosial seperti tidak disiplin dan pemicu terjadinya kemacetan lalu lintas. Kereh menambahkan, melihat PKL tidak bisa hanya menggunakan kacamata kuda. Jika demikian akan muncul image negative dibenak kita bahwa PKL sebagai sumber masalah dan kelompok yang sulit diatur.

Pemerintah kota dan anggota Dewan melihat mereka dari perspektif yang lain. Mereka adalah sosok yang tidak pernah menyerah, realistis, dan penuh semangat. Meski kehidupan mereka saat ini sangat berat, semua yang dilakoni tanpa banyak mengeluh. Kalau begitu mereka harus diperhatikan, didukung dan difasilitasi, demikian menurut Brata.

Ketika Jummy Rimba Rogi dan Abdi Buchari dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota pertama pilihan rakyat pada 23 Agustus 2005, mereka berjanji untuk mensejahterakan masyarakat kota Manado (KOMENTAR, 2007). Tentu saja ini termasuk sektor informal dimana, ada 4,046 PKL (PD Pasar, 2006)

2006). Baltibang Kabupaten Gresik mendefinisikan PKL sebagai suatu bentuk usaha informal yang dilakukan oleh

bersama keluarga, bermukim. Kereh menyatakan PKL itu aset daerah, sedangkan Amri menyatakan PKL itu pahlawan kota.

Menurut (Hamid, 2006) sistem perekonomian kita adalah perekonomian rakyat. Peran penting ekonomi rakyat adalah penyerapan tenaga kerja. Masalah kekurangan capital (investasi) yang kita hadapi dipecahkan dengan pola investasi yang padat tenaga kerja. Masih menurut Hamid dengan investasi relatif sedikit (Rp 1,5 juta per unit per bulan per tahun) usaha-usaha kecil bisa membantuh memecahkan masalah pengangguran. Atau seperti yang diistilahkan (ESTER, 2006) bahwa sektor informal ini diharapkan dapat berperan sebagai “Katup Penyelamat” dalam menghadapi masalah lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tidak dapat terserap, dalam sektor modern/formal. Usaha-usaha kecil ini perlu lebih mendapatkan pemihakan dari pemerintah terkait antara lain dalam bentuk memberi peluang usaha lebih besar, bantuan permodelan, pembinaan, dan sebagainya.

(Richmadi, 2005) mengutip ucapan Ujang Basri, ketua asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Jakarta Barat: “Kami, pedagang kaki lima bisa taat aturan berjualan.” Selama ini kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam membina pedagang kaki lima adalah soal harmonisasi antar pedagang kaki lima dengan ketersediaan ruang publik, tata kota, dan estetika ruang kota.

“Saat ini ada sekitar 14 juta pedagang kaki lima yang potensinya cukup besar dan bis menyediakan pekerjaan yang luas. Namun sampai saekarang nasib mereka terkantung-kantung,” papar (Rustami, 2005). Menurut Rustami Kementrian Koperasi telah mengimbau seluruh pemerintah kota/kabupaten segera mengimplentasikan keberpihakan terhadap pedagang kaki lima yang di atur UU No. 5/1995 tentang Usaha Kecil dengan mengeluarkan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima. Selama ini baru beberapa daerah saja yang sudah dengan baik mengimplementasikan kebijakan pedagang kaki lima itu seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat.

Kebijakan-kebijakan. Dari studi kasus “Pengarahan Pedagang Kaki Lima sebagai Dasar Petimbangan Kebijakan Pemerintah Sidoarjo” (ESTER, 2006) menyatakan Pemerintah Kota Sidoarjo telah membuat kebijakan yaitu memindahkan PKL ke lokasi baru. Akan tetapi kebijakan ini belum memberikan hasil yang memuaskan khususnya bagi PKL, karena tidak sesuai lokasi tersebut bagi mereka. Dalam laporannya di ulang tahun pemerintahan Rogi-Buchari, dilaporkan bahwa salah satu keberhasilan mereka yang menonjol adalah menata pusat kota dan pasar-pasar tradisional dari kesemrawutan Pedagang Kaki Lima (KOMENTAR, 2007). Hampir setiap hari media massa melaporkan adanya berbagai bentrok antara Polisi PP dan PKL. Bahkan ada yang saling “baku hantam” dan lempar batu. Indikasinya adalah sekalipun sudah ada berbagai kebijakan, masalah PKL di kota Manado masih terus berlangsung.

Tempo 10 Januari 2005, menulis ratusan pedagang kaki lima (PKL) disepanjang jalur hijau dan trotoar Jalan Ahmad Yani, Jalan Pramuka, Jalan Matraman, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur ditertibkan. Operasi ini untuk melaksanakan Tim Pengendali Kawasan Selemba-Kramat-Doponegoro menyatakan PKL yang berada di sekitar Rumah sakit terkait sesuai kebutuhan institusi tersebut. Pedagang yang ditampung hanya mereka yang berdagang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, pengajar atau petugas rumah sakit semisal pedagang makanan dan minuman. Yang tidak diperlukan diharapkan tidak berdagang, hal ini berarti kebanyakan PKL tidak tertampung.

Meskipun PKL mempunyai banyak manfaat namun menurut (Reskoadiprodjo & Handoko, 1999) dapat juga mengakibatkan kerugian-kerugian yang dapat merugikan masyarakat secara umum. Sikap negatif sektor PKL ini telah mendapatkan tantangan dari berbagai kalangan.

Tantangan-tantangan terhadap PKL itu datang dari aparat birokrat, pemakai jalan dan bahkan dari para ilmuwan. Menurut pihak-pihak diatas keberadaan PKL membawa ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan PKL membawa tidak hanya dirasakan oleh masyarakat tetapi dialami juga oleh pedagang kaki lima ini. (Kereh, 2006) menjelaskan ketidaknyamananpun muncul di tingkat PKL karena ketidak aturan yang jelas, bisnis jual beli lahan dan tempat usaha, iuran harian yang belum tentu masuk ke kas daerah dan tentu saja keamanan. Suatu ketika, ketika tempat usaha mereka digusur atau “diratatanahkan” menurut istilah (Manado Post, 2006) seorang PKL berucap, “Yang begini ini tidak manusiawi lagi. Katanya, melindungi rakyat padahal menysarakan rakyat.”

Pedagang Kaki Lima memang fenomenal. Banyak label yang dialamatkan kepada mereka. Komunikasi pinggiran, perusak keindahan kota, penyebab kesemrawutan, tidak tertib, tidak patuh, dan lain-lain. Tetapi (Kereh, 2006) menyebutkan mereka “asset” dan (Amri, 2006) Ketua HMI Cabang Manado dan juga anggota dewan yang dibesarkan oleh PKL.

Menyatakan PKL adalah Pahlawan Kota kalau ditata dan dikelola dengan baik. “sebenarnya kalau ditata dan dikelola dengan baik, PKL itu dapat menjadi “asset” atau “pahlawan” kota Manado yang mestinya memberikan kontribusi positif untuk mencapai Manado Kota Pariwisata Dunia 2010” demikian Kereh. Fenomena inilah yang akan diteliti, dianalisa dan ditanggulangi.

Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan PKL di kota Manado ini bagi warga kota dan kenyamanan kota, dan apa solusi yang terbaik dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Manfaat Penelitian. Manfaat Teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan kearah pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat Praktis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pemerintah khususnya didalam menciptakan keteraturan dan penyamanan dalam hidup bermasyarakat di dalam suatu kerangka aturan yang telah ditetapkan menuju Manado kota pariwisata Dunia Tahun 2010.

Perda Nomor 11 tahun 1988, yaitu menciptakan kawasan tertib, aman dan bersih di sepanjang jalur hijau.

Lain lagi dari Jakarta Pusat, Walikota Madya Jakarta Pusat, Muhyat, (Badriah, 2005) usai acara peresmian

Metode Penelitian. Waktu dan Lokasi Penelitian. Penelitian ini sudah mulai dari bulan Juli 2006. Tetapi terjadi pengrusakan besar-besaran terhadap PKL di Kota Madya Manado di bulan Agustus 2006. Pedagang kaki lima marah besar. Mereka tidak mau diajak bicara tentang keberadaan mereka. Peneliti merasa tidak bijak dan tidak akan objektive hasilnya bila dipaksakan. Penelitian dihentikan sementara sampai situasi memungkinkan.

Kurangnya waktu inilah digunakan mencari informasi dari berbagai literature. Pada Mei 2007 mengumpulkan informasi dari berbagai sumberpun dilaksanakan secara insentif terutama kepada pedagang kaki lima. Untunglah setelah beberapa bulan berselang PKL menjadi lebih kooperatif. Demikian juga dengan aparat dan para birokrat.

Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah Kota Madya Manado terutama di tempat-tempat yang padat PKL. Seperti Pasar Bersehati, Pasar Pinasungkulan (Korombasan), Pasar 45, dan tempat-tempat lain. Kota Manado yang berpendudukan 420.351 orang yang tersebar di sembilan kecamatan menampung 4.046 pedagang kaki lima.

Proses pelaksanaan dilakukan dalam beberapa tahap. Pelaksanaannya diawali dengan observasi lapangan, pembuatan proposal/seminar, wawancara/pengumpulan data, analisis data, seminar hasil penelitian dan diakhir pembuatan laporan dan rekomendasi. Pendekatan ini menggunakan open ended survey. Metode survey ini menggunakan instrument wawancara, dimana data yang dikumpulkan berupa data deskriptif penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode studi kasus yang berusaha mendeskripsikan suatu masalah, keadaan atau suatu peristiwa secara rinci dan mendalam. Studi kasus merupakan strategi yang dipilih untuk menjawab pertanyaan apa dan bagaimana pelaksanaan sesuatu jika peneliti berusaha menelaah keadaan dalam konteks kehidupan nyata seperti apa masalahnya dan apa solusinya.

Prinsip-Prinsip Penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memperhatikan prinsip-prinsip penelitian deskriptif survey. Etika penelitian adalah isu sentral karena sebagian besar penelitian ini menggunakan manusia sebagai objek penelitian. Untuk itu peneliti berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip penelitian sebagai berikut ini:

Memperoleh izin dari suatu instansi atau tokoh yang berwenang. (1) Mengidentifikasi informan, yaitu orang yang dapat memberikan informasi yang diperlukan. (2) Melindungi identitas informal. (3) Menulis apa adanya dalam penulisan penelitian.

Subjek Penelitian. Subjek penelitian ini adalah 4.406 pedagang kaki lima yang berada di seluruh wilayah Kota Manado. Subjek penelitian lainnya adalah aparat kota, Polisi PP, pemilik toko, supir angkot, pemakai jalan/trotoar, dan lainnya. Tentunya tidak mungkin untuk menjangkau dan mewawancarai mereka semua ini. Peneliti, oleh pertolongan direktur penelitian

dan rekan-rekan peneliti memutuskan untuk hanya memilih 343 dari 4.406 PKL atau 4,48 persen dari total populasi, 149 aparat kota, 13 polisi PP dan 44 Pemakai jalan sebagai sampel penelitian.

Semua responden telah dipilih secara acak dan telah mewakili semua populasi secara proporsional. Wawancara survey ini dilaksanakan oleh peneliti dan dibantu oleh 62 mahasiswa. Mereka adalah mahasiswa tingkat III dan IV yang sudah dipilih dan dilatih. Mereka dari kelas-kelas Fund Accounting, Organization Behavior, Perekonomian Indonesia, dan Advertising Management di Universitas Klabat tahun ajaran 2006/2007.

Pengumpulan dan Pengolahan Data. Data dan informasi dalam penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara. Masing-masing responder di datangi di rumah atau di tempat usaha/kerja untuk diwawancarai. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan adalah sebagai berikut: nama, umur, alamat, profesi/pekerjaan, dan

kedua hal menjadi pokok penelitian ini yaitu: (1) Menurut anda apakah masalah pokok dengan keberadaan pedagang kaki lima di Kotamadya Manado? (2) Apakah anjuran anda sebagai solusi masalah tersebut?

Jawaban kedua pertanyaan diatas kemudian dikumpulkan, dihitung, dianalisa, dan diklasifikasi sebagai hasil survey penelitian ini. Adapun pengklasifikasikannya yaitu apa saja masalah PKL menurut: PKL, Aparat kota, Polisi PP, dan Pemakai jalan. Kemudian apa solusinya menurut profesi-profesi tersebut diatas.

Penyajian Hasil Penelitian. Hasil penelitian ini akan disajikan sebagai berikut: (1) Masalah pedagang kaki lima, Aparat kota, Polisi PP, dan Pemakai jalan. (2) Solusi masalah menurut PKL, aparat kota, Polisi PP, dan Pemakai jalan.

Hasil Penelitian. Berikut ini akan ditampilkan tabel sampel dari penelitian ini.

Tabel 2. Sampel penelitian

No	Profesi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pedagang Kaki Lima	4,046	343	8.98
2	Aparat	-	149	-
3	Polisi Pm"V Na		13	
4	Peni" Jalan		44	

Penelitian membagi pedagang di kota Manado dan apa solusi dari masalah-masalah tersebut. Baik masalah maupun solusi kedua-duanya menurut versi PKL, Aparat Kota, Polisi Pamong Praja dan Penjalan Kaki. (1) ditanyai apa masalah anda sebagai PK, lebih separuh (50.73 persen) menyatakan pemerintah tidak

memberikan mereka lokasi strategis yang banyak pembelinya, 35,57 persen menyatakan mereka kurang konsentrasi berusaha karena sering dirazia yang terkadang kasar. Lima masalah lain persentasinya kecil (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Masalah PKL menurut mereka sendiri

No	Masalah	Frekuensi	Persentase
1	Pemerintah kota memberikan lokasi yang tidak strategis yang kurang pembeli yang mengakibatkan kurangnya pendapatan	174	50.73
2	Razia yang dilakukan Aparat penerbitan secara mendadak yang kadang-kadang berperilaku kasar menjadikan mereka tidak konsentrasi dalam berusaha	122	35.57
3	Biaya sewa kios/lokasi usaha yang mahal	16	4.66
4	Peungutan-pungutan liar baik dari petugas maupun dari preman	13	3.79
5	Kurang modal	9	2.62
6	Jalur transportasi yang berubah-ubah	6	1.75
7	Lain-lain	3	0.88
	Total	343	100.00

(2). Menurut Aparat Kota, Polisi PP dan pejalan kaki, masalah PKL di Kota Manado ada empat yaitu: mempersempit jalan umum, mengganggu keindahan kota,

lingkungan jadi tidak bersih dan sehat, dan sukar memungut retribusi (lihat Tabel 4 lihat di halaman berikut).

Tabel 4. Masalah PKL menurut Aparat, Polisi PP dan pejalan kaki

No	Masalah	Frekuensi	Persentase
----	---------	-----------	------------

1	Mempersempit jalan umum dan trotoar yang mengganggu pejalan kaki, sopir, pemilik toko, tempat parkir, dan lainnya	118	59.71
2	Mengganggu keindahan kota	40	19.98
3	Lingkungan jadi tidak bersih dan tidak sehat	22	11.18
4	Sukar memungut retribusi karena sering pindahnya lokasi	18	9.13
Total		198	100.00

(3). Bagian yang ketiga ini adalah solusi atas masalah PKL menurut PKL sendiri atau aoa yang mereka inginkan dari para membuat keputusan. Berdasarkan tabel ini pada umumnya (62.79 persen) menginginkan tempat yang strategis yang mudah dijangkau pembeli.

Jumlah yang cukup besar (22.92 persen) menginginkan agar mereka diberi kebebasan berjualan dimana mereka suka. Enam anjuran lain persentasenya kecil (lihat Tabel 5 di halaman berikut).

Tabel 5. Solusi PKL menurut versi mereka

No	Solusi	Frekuensi	Persentas
1	Memberikan tempat yang strategic bagi PKL yaitu tempat yang mudah dijangkau oleh pembeli	189	62.79
2	Memberikan kebebasan kepada PKL untuk berjualan	69	22.92
3	Mengubah jalur kendaraan agar melewati lokasi PKL di Pasar Bersehati	13	4.32
4	Agar Pemerintahan Kota menerbitkan pungutan-pungutan liar	10	3.32
5	Pemerintah memberikan pelatihan dan tambahan modal kepada PKL	6	2.00
6	Pemerintah berdialog dengan PKL dalam, membuat kebijakan yang berhubungan dengan PKL	6	1.99
7	Memberi ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh penyitaan dan penggusuran	5	1.66
8	Memberikan tempat yang biaya sewanya lebih murah	3	1.00
Total		301	100

(4). Jalan keluar masalah PKL, menurut Aparat Kota. Tabel menunjukkan 60.84 persen dapat mengajurkan agar para PKL diberikan tempat yang lebih

baik dan lebih nyaman. Anjuran-anjuran lain kurang berarti (lihat Tabel 6 di halaman berikut).

Tabel 6. Solusi PKL menurut Aparat Kota

No	Solusi	Frekuensi	Persentas
1	Diberikan tempat yang baru yang baik sarana maupun prasarana lebih baik dan Nyaman	87	60.48
2	PKL harus mau bekerja sama dengan pemerintah	14	9.79
3	Mngadakan pendekatan yang manusiawi sosialisasi dan pembinaan	9	6.29
4	Menertipkan jalan dan menata kota	8	5.59
5	Mengarahkan Polisi Pamong Praja	7	4.89
6	Merubah jalur trayek agar melewati tempat yang disediakan	5	3.50
7	Membuat peraturan yang tegas	4	2.80
8	Menambah lapangan kerja	2	1.40
9	Penggusuran paksa	2	1.40
10	Memberikan uang ganti rugi	2	1.40
11	Memperbanyak petugas kebersihan	2	1.40

12	Memulangkan PKL ke kampung halaman mereka	1	0.70
Total		143	100.00

(5). Solusi PKL menurut polisi Pamong Praja. 53.85 persen Polisi PP mangajurkan agar para PKL diberikan tempat yang baru, 23.08 persen mangajurkan Pemerintah Kota agar menata kembali kota ini. Jumlah

responder yang mangajurkan pemberian sosialisasi/pembinaan dan memulangkan mereka Cuma 15.38 persen dan 7.69 persen berturut-turut (lihat Tabel 7).

Tabel 7. Solusi PKL menurut Polisi Pamong Praja

No	Solusi	Frekuensi	Persentas
1	Diberikan tempat yang baru	7	53.85
2	Menata kota kembali	3	23.08
3	Mengadakan sosialisasi dan pembinaan	2	15.38
4	Memulangkan mereka ke kampung halaman mereka	1	7.69
5	Total	13	100.00

(6). Solusi PKL menurut oemakai jalan. Responder pemakai jalan mengusulkam delapan cara mengenai PKL. Mayoritas pemakai jalan (61.36 persen) menghendaki PKL dipindah. Ketujuh solusi lainnya masing-masing yang diusulkan oleh kurang dari 10 persen responden. Rincian ditribusinya ada di Tabel 8 (lihat halaman berikut).

Tabel 8. Solusi PKL menurut Pemakai Jalan

No	Solusi	Frekuensi	Persentas
1	Menyediakan lokasi baru yang strategic	27	61.36
2	Mengubah jalur mobil melewati lokasi baru	4	9.09
3	Menunjuk petugas khusus mengawasi PKL	3	6.82
4	Menyediakan lapangan kerja	3	6.82
5	PKL harus ditertipkan	3	6.82
6	Menentukan waktu khusus untuk per bulan	2	4.55
7	Diberikan ganti rugi	1	2.27
8	Membuat peraturan yang tegas	1	2.27
Total		44	100.00

KESIMPULAN

Rangkuman hasil wawancara dengan PKL dapat disimpulkan bahwa ada dua masalah utama keberadaan PKL di kota Manado yaitu: Pemerintah kota kurang memberikan perhatian terhadap lokasi dan relokasi PKL. Mereka beranggapan Pemerintah kota hanya memberikan mereka lokasi yang tidak strategis dan sepi pembeli.

PKL merasa tidak nyaman dalam melakukan kegiatan-kegiatan usaha mereka sebab adanya razia-razia yang dilakukan petugas penertiban. PKL juga merasa perlakuan petugas penertiban kota kadang-kadang melampaui batas alias kurang manusiawi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparat Kota, Polisi PP dan pemakai jalan nempaknya masalah utama keberadaan PKL di kota Manado adalah sebagai berikut: Memacetkan jalan-jalan umum, trotoar, tempet-tempet pakir, tempat-tempat umum dan lain nya. PKL yang sudah menjamur telah merusak ketertiban dan keindahan kota. Hasil wawancara dengan PKL, mereka

mangajurkan empat solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah kota, yaitu: Pemerintah kota memberikan lokasi yang banyak pembeli. Pemerintah kota memberikann kebebasan kepada para PKL berjualan dimana saja mereka mau. Pemerintah kota merubah jalur angkutan kota melewati lokasi PKL. Pemerintah kota menertipkan pungutan-pungutan liar, baik yang dilakukan oleh petugas maupun preman.

Data yang diperoleh dari Aparay kota, Polisi PP, dan pejalan kaki hampir sama yang dapat diklasifikasikan menjadi empat anjuran yaitu: Memberikan lokasi yang

bare (merelokasi PKL) Memberikan sosialisasi dan pembinaan-pembinaan. Merubah jalur angkutan kota. Menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga kota.

Saran. Konklusi umum penelitian ini adalah PKL di kota Manado banyak masalah yang solusi utamanya adalah pindah lokasi. Karena terbatasnya penelitian ini, peneliti menyrankan kepada semua pihak untuk melakukan penelitian lanjutan sehubungan dengan

masalah PKL ini. Dari hasil pengamatan dan wawancara mengenai masalah PKL di kota Manado, disarankan pula hal-hal sebagai berikut:

Pemerintah kota Manado perlu menyediakan lahan yang lebih luas, yang dikhususkan bagi pedagang kaki lima (PKL) agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat lainnya.

Pedagang kaki lima menjalankan aktivitasnya perlu mematuhi setiap aturan yang dibuat agar mereka tidak akan berhadapan dengan hukum atau sanksi dari suatu pelanggaran.

Pemerintah Kota Manado khususnya para petugas penertiban lainnya perlu menerapkan secara tegas tentang peraturan pemerintah menyangkut PKL agar mereka benar-benar dapat mematuhi setiap peraturan yang dikeluarkan.

Pemerintah kota Manado demi keindahan dan ketertiban kota maka sebaiknya perlu dipikirkan untuk merelokasi para PKL di tempat yang lebih layak dan strategis yang secara ekonomis dapat menguntungkan PKL itu sendiri dan juga menjamin kenyamanan masyarakat pada umumnya.

REFERENSI

- Amri, K. (2006, September 22). PKL Pahlawan Kota. Manado, Sulawesi Utara, Indonesia: Manado Post
- BALITBANG Kabupaten Gresik. (2005). Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik. Retrieved September 27, 2007, from BALITBANG Kabupaten Gresik Web Site: <http://www.litbang.gresik.go.id>
- Brata, A. G. (2006, Januari). Relokasi Kaki Lima: Pemerintah, tanpa PKL. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Damsar. (2002). Sosiologi Ekonomi. Jakarta: PT. Raja
- Grafindo Persada. Djojohadikusumo, S. (1987). Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia.
- ESTER. (2006, December 12). ITS Digital Library. Retrieved September 27, 2007, from ITS Web Site: <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=oai:digilib.Its.ac.id:ITS-Master-3100003018994&q=Research>
- Hamid, E. S. (2006). Ekonomi Indonesia Dari Sentralisasi ke Desentralisasi. Yogyakarta: U11 Press.
- Kereh, H. (2006, September 8). PKL itu Asset. Manado, Sulawesi Utara, Indonesia: Manado Post.
- KOMENTAR. (2007 Agustus 24). Advertorial Manado, Sulawesi Utara, Indonesia: KOMENTAR.
- Manado Post. (2006, Agustus 16). Demi Mimpi Manado Kota Pariwisata. Manado, Sulawesi Utara, Indonesia: Manado Post.
- Manado Post. (2006, September 23). Lagi, Pemkot Tertibkan PKL: Petugas dan PKL Sempat Bersitegang. Manado, Sulawesi Utara, Indonesia: Manado Post.
- Richmadi, R. (2005, Maret 14). Tempo Interaktif Retrieved September 21, 2007, from Tempo Web Site: <http://www.tempointeraktif.com/fhg/jakarta/2005/03/04/brk,20050314-15,id.html>
- Rksohadiprodjo, S., & Handoko, H. (1999). Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur, dan Perilaku. Yogyakarta: BPFE.
- Rusli, R. (1992). Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima. Jakarta: MD. Hill, Co.
- Rustami, R. (2005, September 26). Departement Koperasi. Retrieved September 27, 2007, from Department Koperasi Web Site: http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=536&Itemid=169
- Sarwan, A. R. (2004). Studi Perilaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Kota Manado. Manado: Program PascaSerjana Universitas Sam Ratulangi.